

PROSIDING

**SEMINAR NASIONAL
MANAJEMEN, EKONOMI, AKUNTANSI
DAN *CALL FOR PAPER***

"Restrukturisasi Ekonomi dan Bisnis di Era Covid 19"

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Sabtu, 19 September 2020



Penerbit Fakultas Ekonomi
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, Akuntansi V 2020

Restrukturisasi Ekonomi dan Bisnis di Era Covid 19

Pemakalah SENMEA V

Diterbitkan Oleh/ Published by :
Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jl. KH.Ahmad Dahlan no.76 Kediri

Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, Akuntansi V 2020:
Restrukturisasi Ekonomi dan Bisnis di Era Covid 19

Penanggung jawab : Dr. Subagyo, M.M.
Pengarah : Sigit Puji Winarko, M.Ak
Restin Meilina, M.M.
Bayu Sulindra, M.Pd.

Ketua pelaksana : Dr. Faisol, M.M.
Sekertaris : Erna Puspita, M.Ak
Bendahara : Ismayantika Dyah Puspasari, M.B.A.
Dyah Ayu Paramitha, M.Ak

Tim Reviewer : Prof. Sugiyono, M.M.
Dr. Subagyo, M.M.
Dr. Samari, M.M.
Dr. Rr. Foryjati, M.M.
Dr. M. Muchson, M.M.
Dr. M. Anas, M.M., M.Ak.

Tim Call Paper : Diah Ayu Septi Fauji, M.M.
Amin Tohari, M.Si.
Linawati, M.Si.
Diah Nurdiwati, M.S.A.
Bambang Agus Sumantri, M.M.
Dr. Eunike Rose Mita Lukiani, M.Pd.
Hery Purnomo, M.M.
Dhiyan Septa Wihara, S.P., M.M.

Editor : Diah Ayu Septi Fauji, M.M.
Setter / Lay-outer : Amin Tohari, M.Si.
Desain Cover : Achmad Muhaimin, S.E.
Tema Cover : Sinergy of Technology

Cetakan 1, September 2020
ISBN : 978-623-94619-4-2

Diterbitkan Oleh/ Published by :
Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Nusantara PGRI Kediri
Jl. KH.Ahmad Dahlan no.76 Kediri

PRAKATA PANITIA

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Seminar ke-5 Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi (SENMEA) bertema “Restrukturisasi Ekonomi dan Bisnis di Era COVID 19” dapat diselenggarakan pada 19 - 20 September 2020. Konferensi ini dilatarbelakangi oleh Fenomena wabah pandemi COVID memaksa individu, kelompok, instansi, negara untuk mengubah gaya hidup dan perilaku selama ini. Jika individu, kelompok, lembaga, negara tidak melakukan perubahan, maka perubahan itu otomatis akan menghancurkan mereka. Konferensi tersebut bertujuan untuk mendapatkan ide, rumusan kebijakan, dan sinergi menuju perekonomian nasional dan global yang inklusif, baik dalam lingkup ekonomi, bisnis, maupun akuntansi.

Konferensi tersebut mengundang keynote speaker dan pembicara dari kalangan pemerintah, pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi untuk membahas tema seminar. Keynote speaker dalam konferensi ini adalah Emil Elistianto Dardak, Ph.D (Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Indonesia), Prof. Candra Fajri Ananda, SE., M.Sc. P.hD. (Anggota FGD RUU BI, Kerjasama Internasional, Bagian Eropa Universitas Brawijaya), Dias Satria, SE., M.App.Ec., PhD. (Ketua Program Sarjana Internasional (Ekonomi, Keuangan dan Perbankan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya). Pembicara yang diundang adalah Dr. Sri Aliami MM. (Peneliti dan Dosen Manajemen UNP Kediri), Dr. Eunike Rosa Mita Lukiani, M.Pd (Peneliti dan Dosen Pendidikan Ekonomi UNP Kediri), Dr. Faisol (Dosen dan Pemimpin Redaksi Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Universitas dari Nusantara PGRI Kediri).

Selain itu, sebanyak 82 makalah dari kalangan akademisi termasuk mahasiswa dipresentasikan dalam konferensi ini. Konferensi ini dihadiri oleh pembicara dan pemateri dari beberapa Universitas yaitu STIE Nganjuk, Politeknik Cahaya Surya Kediri, STT Cahaya Surya, Universitas Batik Surakarta, Universitas Muhamadiyah Sukabumi Jawa Barat, Universitas Trunojoyo, Universitas Katholik Widya Mandala Madiun, Universitas Islam Kadiri, STIE Sultan Agung, dll.

Dalam kesempatan tersebut panitia menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yaitu:

- a) Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI yang memfasilitasi konferensi ini;
- b) Seluruh panitia, reviewer, dan mahasiswa yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik;
- c) Semua presenter yang telah memberikan kontribusi dan berbagi ide yang relevan dengan tema dan sub-tema konferensi ini; dan
- d) Semua peserta dan sponsor yang telah berpartisipasi dalam konferensi ini.

Terakhir, panitia berharap konferensi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu ekonomi, bisnis, dan akuntansi. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan konferensi seri selanjutnya kedepannya.

Kediri, September 19th, 2020

Dr. E. Faisol
Ketua Panitia

SAMBUTAN DEKAN

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, Akuntansi, dan *Call for Paper* (SENMEA 5) dengan tema “**Rekstruturisasi Ekonomi dan Bisnis di Era Covid-19**” dapat terlaksana.

Perekonomian dunia mengalami pelambatan sejak *covid-19* ditetapkan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia pada akhir Februari yang lalu. Akibat pandemi masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Masyarakat harus berhati-hati dan menjaga jarak dalam berinteraksi dengan orang lain. Dampak dari pembatasan tersebut, perilaku masyarakat mengalami perubahan, yang semula kegiatan banyak dilakukan secara *offline*, berubah menjadi *online*. Hal tersebut menjadikan beberapa pelaku usaha khususnya di bidang transportasi, wisata dan perhotelan mengalami hambatan, demikian pula usaha yang selama ini mengandalkan penjualan secara *offline* mengalami penurunan penjualan yang signifikan, dan bahkan banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terpaksa harus gulung tikar.

Sebanyak 97% lebih pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, sehingga kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja sangat besar. Jika sektor yang memiliki banyak keterbatasan ini tidak diselamatkan, maka perekonomian nasional dapat terganggu. Begitu besar peran UMKM dalam ekonomi suatu negara, keberadaan UMKM menjadi perhatian serius oleh pemerintah dalam masa pandemi ini. Alokasi dana yang cukup besar digelontorkan untuk mengurangi dampak pandemi *covid-19* dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat yang akhirnya bisa menggerakkan roda perekonomian, mulai dari *rebudgeting*, insentif perpajakan, restrukturisasi kredit, fasilitasi akses pasar, pelatihan-pelatihan dalam rangka memperkuat kapasitas UMKM sampai dengan pelatihan *e-marketing*.

Kebijakan dan insentif yang diberikan oleh pemerintah sifatnya sementara, oleh sebab itu pelaku UMKM harus menerapkan berbagai strategi agar usaha tetap bertahan dan bahkan bisa berkembang pada masa dan pasca pandemi *covid-19*, baik strategi pemasaran, pengelolaan keuangan, produksi dan optimalisasi kemampuan wirausaha. Oleh sebab itu dengan momentum seminar nasional dan *call for paper* yang mengambil tema “**Rekstruturisasi Ekonomi dan Bisnis di Era Covid 19**” bisa memberikan kontribusi pemikiran nyata bagi pelaku usaha dalam menghadapi era *covid-19*.

Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan, atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nisantara PGRI Kediri saya mengucapkan terimakasih kepada para nara sumber, pemakalah dan peserta seminar dalam SENMEA ke lima ini, semoga sumbang pemikiran bpk/ibu/sdr memberi kontribusi yang positif bagi kemajuan perekonomian Indonesia.

Dekan FEB,

Dr. Subagyo, M.M.

Daftar Isi

No	Nama	Judul
1	Acai Sudirman, Fitria Halim, Grace Endang Pakpahan, Sherly	Faktor-Faktor Yang Mendorong Minat Beli Smartphone Merek Oppo Dalam Kondisi Pandemi Covid-19
2	Afida Dwi, Sri Mulyani, Nita Andriyani	"Pengaruh Akuntansi Berbasis SAK EMKM, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Karakteristik Usaha Terhadap Kualitas Laporan Keuangan"
3	Ahmad Sahal, Muchson	Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (Pbl) Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Produk Kreatif Dan Kewirausahaan
4	Ajeng Aulia Mursidah, Gatot Wahyu Nugroho, Elan Eriswanto	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dan Pengupahan (Studi Kasus Pada Pt. Pratama Abadi Industri Jx)
5	Alif Diah Puspitasari, Choirul Hadi Nawawi	"Analisis Peningkatan Pemasaran Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Media Sosial Di Tengah Pandemi Covid 19"
6	Alya Aprilianti, Gatot Wahyu Nugroho, Idang Nurodin	"Analisis Sistem Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Unit Situmekar)"
7	Andi Rahmina Pratami	<i>Transparency Of Money And Building Tax Payment Management In Prevent Fraud (Case Study In Balekambang Village, South Nagrak Village, North Nagrak Village, And Pawenang Village Nagrak District Sukabumi District)</i>
8	Anisa Dewi Raharja, Acep Suherman	"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa"
9	Aulia Vivi Ristiani	<i>Leverage, Ukuran Perusahaan, Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Farmasi Di BEI Periode 2012-2018</i>
10	Samari, Bambang Agus Sumantri	"POAC Fintech Inovasi Koperasi Tinjauan POAC Berkaitan <i>Financial Technology (Fintech)</i> Dan Inovasi Koperasi Indonesia"
11	Daru Atmoko	"Karakteristik Perusahaan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Logam Dan Sejenisnya Di Bursa Efek Indonesia)"
12	Darwin Irawan, Diah Ayu Septi Fauji, Lita Deviana Sari, Sulton Ali Al-Aradatin	"Kontruksi Budaya Ngopi Bagi Generasi Millennial Di Kota Kediri"
13	Delita Natalia, Acep Suherman	Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
14	Denok Sunarsi ¹ , Hadion Wijoyo ² , Dodi Prasada ³ , Dede Andi ⁴	Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Mentari Persada Di Jakarta

15	Dessi Fajri, Siti Laelatul Khasanah, Annisa Fitria Dewi, Fefi Diniyati Sholihah, Yuni Nurlaili	"Urgensi Pemanfaatan <i>E-Marketing</i> Terhadap Berlangsungnya UMKM Di Wilayah Kediri Dan Sekitarnya"
16	Devi Nanda Dwi Oktavian, Puji Astuti	"Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017-2018"
17	Dewi Kristiani Nova, Dian Kusumaningtyas	Sistem Informasi Akuntansi Omah Jenang Kelapa Sari Blitar
18	Dian Lianawati, Sugiono	Efektivitas Pembelajaran Mata Pelajaran Ekonomi Melalui Implementasi Metode Cooperative Learning Berbasis Kasus Dan Pembiasaan Literasi Pada Kelas Xi Iis Di Ma Sunan Ampel Plosoklaten Tahun Pelajaran 2019/2020
19	Dita Rindi Saleha, Mar'atus Solikah	"Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dan Pertumbuhannya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun Periode 2014-2018"
20	Dodi Kusuma Hadi Soedjoko, Hery Purnomo, Basthoumi Muslih, Amin Tohari	Pemodelan Regresi Pada Produktivitas Kerja Karyawan Usaha Furniture Berdasarkan Pengawasan, Kedisiplinan, Dan Lingkungan Kerja
21	Dwi Priyo Santoso	<i>The Impact Of Corona-Virus Outbreak On Indonesia's Tourism Sector</i>
22	Dyah Ayu Paramitha	Analisis Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> Pada Bank Umum Syariah
23	Dyah Kurniawati	Pengaruh <i>Customization, Basic Market Orientation</i> Dan <i>Competitive Benchmarking</i> Terhadap <i>Customer Retention</i>
24	Dyah Suswanti Respatiningtias, Mita Sundari	Analisis Strategi Bersaing Dalam Peningkatan Jumlah Konsumen Pada Perusahaan Jasa Mengemudi Baruna Nganjuk
25	Dyan Arintowati, Mustafidah Mahardhika	Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Dan Harga Dalam Mempengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen
26	Edo Samudra, Sugeng	Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018
27	Edy Sudaryanto	"Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah "X""
28	Eny Rosidhah Et Al.	Pengembangan Bahan Ajar Kewirausahaan Berbasis Ekonomi Kreatif
29	Ernest Grace, Christine Dewi Nainggolan, Sepbeariska Manurung	Pengaruh Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
30	Farida Dwi Anggraini, Nur Kholipah, Firda Alyang Luvita, Zainal Arifin	Pengaruh Penggunaan Internet Terhadap Bisnis Online Di Kediri Pada Masa Pandemi Covid-19
31	Rr. Forijati, M. Anas, Eni Rosidah	"Pengembangan Inovasi Pembelajaran Ekonomi Mikro Dengan Model Addie"
32	Handry Rustandi, Acep Suherman	Analisis Z-Score Untuk Memprediksi Kebangkrutan Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei 2016-2018
33	Hery Pandapotan Silitonga, Jenni Gultom, Lenny Dermawan Sembiring	Efektifitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar)

34	Hery Purnomo	"Optimasi Pengendalian Persediaan Produk Makanan Hewan Di Toko Queen Kediri"
35	Hery Purnomo; Rino Sardanto, Basthoumi Muslih	Signifikansi Harga, Fasilitas Dan Layanan Pada Tingkat Kepuasan Konsumen Hotel Di Diagram Scatter
36	Indra Dekrijanti	Pengaruh Modal Dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Dengan Lokasi Sebagai Variabel Moderator
37	Indri Irianti, Acep Suherman	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Profitabilitas <i>Return On Asset</i> (ROA)
38	Ita Dwi Fitriana ¹ , Anita Wijayanti ² , Riana Rachmawati Dewi ³	Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang, Dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas
39	Linawati, Irma Diah Aprilia	Efektivitas Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi Atas Transaksi Kas
40	M. Anas	"Peran Sistem Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Kediri"
41	Maria Florentina Meze, Amin Tohari	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018
42	Melati Sukma, Acep Suherman	Analisis Presisi Menggunakan Metode <i>Altman</i> Dan <i>Zmijewski</i> Untuk Memprediksi Terjadinya Financial Distress
43	Meme Rukmini	Dilema Virus Corona Terhadap Perekonomian Indonesia
44	Meta Ekawati Saputra	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap ROA (Return On Asset)
45	Mia Shopia, Gatot Wahyu Nugroho, Elan Eriswanto	Pengaruh Skeptisisme Profesional Terhadap Upaya Pendeteksian Kecurangan (<i>Case Study</i> Pada Pt Bpr Cainjur Jabar)
46	Moh. Alfarizi Baskarayudha S., Binti Alfiyah, Sendi Setiawan, Tjetjep Yusuf Afandi	Pengaruh <i>E-Learning</i> Sebagai Media Pembelajaran Terhadap Keaktifan Mahasiswa Tingkat Dua Pendidikan Ekonomi UN PGRI Kediri Selama Masa Pandemi <i>Coronavirus Disease</i> (Covid-19)
47	Nadya Irhandi Putri, Mumu M. Fadjar, Idang Norodin	"Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Dalam Prespektif Rasio Ketergantungan Daerah Dan Rasio Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi"
48	Nafisatul Muzayadah, Restin Meilina, Basthoumi Muslih	Penerapan <i>Organizational Citizenship Behavior</i> (OCB) Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Pegawai Bagian Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Kediri
49	Nauva Khansa Nabila	Pengaruh Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah Di Indonesia
50	Nikki Ferdiana Siswanto, Hestin Sri Widiawati	Analisis Regresi <i>Moderating Price To Book Value</i> Perusahaan Yang Terdaftar Di JII Tahun 2014-2018 Berdasarkan Profitabilitas Dan <i>Leverage</i> Dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> Sebagai Pemoderasi
51	Firda Novi Antika, Nita Andriyani Budiman, Sri Mulyani	"Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19"
52	Nugro Indah Panutur, Ismayantika Dyah Puspasari, Moch. Wahyu Widodo	Analisis Penyusunan Anggaran Operasional Sebagai Alat Bantu Pengendalian Pada RM Pramu Bandar Lor Kota Kediri
53	Onita Sari Sinaga, Vivi Candra, Debi Eka Putri	Peran Fasilitas Dan Harga Untuk Mendorong Minat Berkunjung Dalam Situasi Covid 19 (Studi Pada Taman Hewan Kota Pematangsiantar)

54	Rahita Rosdiana Putri, Gatot Wahyu Nugroho, Tina Kartini	Analisis Prosedur Dan Kebijakan Kredit Untuk Memperkecil Resiko Kerugian Piutang Tak Tertagih (Studi Kasus Pada PT. Federal International Finance Cabang Sukabumi)
55	Roimatul Hamidah, Citra Intan Harum Permata, Bayu Surindra, Elis Irmayanti	Pengaruh Optimalis Pembelajaran Online Dan Partisipasi Mahasiswa Terhadap Motivasi Belajar Online Mahasiswa Tingkat Ii Pendidikan Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri
56	Sasha Rebeca, Badrus Zaman	Evaluasi Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Kantor Bpkad Provinsi Jawa Timur
57	Sigit Wisnu Setya Bhirawa, Lailatul Fitriah	Penetapan Harga Jual Dengan Metode <i>Cost Plus Pricing</i> Menggunakan Pendekatan <i>Full Costing</i> Pada UD. Dzaky Alam Food Tahun 2019
58	Suci Monika, Subagyo	Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua, Disiplin Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Siswa SMK Putra Harapan Plemahan Tahun Pelajaran 2019/2020
59	Suci Rahmawati Sofian, Deni Iskandar, Idang Nurodin	Analisis Selisih Tarif Rumah Sakit Dengan Tarif Inacbg's Pasien JKN Rawat Inap Kelas 3 Dan Kaitannya Dengan Kualitas Pelayanan
60	Veronika Agustini Srimulyani	"Pengaruh Eustress Peran, Kecerdasan Emosional Dan Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Kesejahteraan Psikologis Mompreneur"
61	Wahidatun Nafiah Alfarda, Mohammad As'adur Rofiq, Muhammad Afif An Nawawi, Rizky	Transformasi Bisnis Kreatif <i>Micro Entrepreneur</i> Dalam Mempertahankan Omset Di Masa Covid-19
62	Wita Nur R, Thalita Yumna W S,Aini Fortunilla,Efa Wahyu Prastyaningtyas	Pengaruh Pembelajaran <i>E- Learning</i> / Online Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Tingkat II Universitas Nusantara PGRI Kediri Selama Pandemi Covid'19
63	Yuliana Sari, Sri Aliami, Ema Nurzainul Hakimah	Analisis Kepuasan Konsumen Ditinjau Dari Kualitas Produk Dan Harga Sate Dan Gulai Pada Depot Pak Eko Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri
64	Arthur Daniel Limantara, Elkana Lewi Santoso, Subagyo	Analisis Penguasaan Teknologi Dalam Kesiapan Kota Kediri Menuju Kota Cerdas (<i>Smart City</i>)
65	Lita Deviana Sari, Subagyo, Moch. Wahyu Widodo	Strategi Pengelolaan Dana PRODAMAS Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri
66	Ari Widodo, Yuli Chomsatu S, Endang Masitoh W	Pengaruh <i>Environmental Performance</i> Terhadap <i>Economic Performance</i> Dengan <i>Environmental Disclosure</i> Sebagai <i>Variabel Intervening</i>
67	Sigit Ratnanto, Hery Purnomo	Substansial Kepuasan Konsumen Rumah Makan "Soto Dok Lamongan" Nganjuk
68	Devi Endahsari, Gatot Wahyu Nugroho, Idang Nurodin	Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Pembetulan,dan Kemampuan terhadap Tindakan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Beberapa Desa Di Kabupaten Sukabumi)
69	Edwin Agus Buniarto	Implementasi Akuntansi Lingkungan Pada RSUD Gambiran Kediri
70	Tyas Karmaylia Krifahurrohamah, Faisol	Peran Pengeluaran Pemerintah pada Pembangunan Manusia: Model Efek Tetap (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur)
71	Niar Imaniar, Andri Indrawan , Risma Nurmilah	PENGARUH PENJUALAN TERHADAP LABA KOTOR (Studi Kasus Pada Home Industry Kopi Karuhun)
72	Zulia Kartikosari, Erna Puspita	Prediksi Kebangkrutan Dengan <i>Z-Score</i>

73	Budi Setyono, Hano Hanafi	Peranan Kelembagaaanpenangkar Benih Padi Dalam Penyediaan Benih Padi Berkualitas Mendukung Ttp(Taman Teknologi Pertanian)Kabupatenkulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta
74	Riska Ardina Nur Afifah, Diah Nurdiwati	Dampak Penerimaan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Dan Pendapatan Sah Lainnya Atas Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)

PROSIDING

2020
SENMEA

SENMEA V 2020

"Restrukturisasi Ekonomi dan Bisnis di Era Covid 19"

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Sabtu, 19 September 2020



Penerbit Fakultas Ekonomi
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ISBN 978-623-94619-4-2



9 786239 461942

“EVALUASI PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 PADA KANTOR BPKAD PROVINSI JAWA TIMUR”

Badrus Zaman. M.Ak¹ dan Sasha Rebeca. A.Md. Akun²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri
e-mail: badrus@unpkediri.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri
e-mail: sashare1802@gmail.com

Abstrak. Berlakunya otonomi daerah berimplikasi pada peran pemerintah dalam mengelola daerah dengan memberikan kewenangan yang nyata, salah satunya kewenangan dalam pengelolaan aset daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan barang milik daerah/ aset daerah pada kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu juga untuk mengetahui kendala apa yang dialami selama proses pengelolaan barang milik daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada selama proses penelitian. Data diperoleh dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan internet searching.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur telah dilakukan sesuai dengan proses pengelolaan barang milik daerah yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, hanya saja masih terdapat kendala seperti keterlambatan penyampaian laporan, dan kesalahan dalam pelaporan sehingga pada akhir tahun anggaran terjadi perbedaan antara laporan pejabat keuangan dan laporan pejabat pengelola barang.

Kata kunci: Pengelolaan Aset Daerah, Permendagri 19 Tahun 2016

1. Pendahuluan

Pengelolaan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kota dan kabupaten memasuki era baru dengan dikeluarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berimplikasi pada peran pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam perkembangan dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya yang ada di daerah tersebut. Salah satu perubahan yang terjadi setelah berlakunya otonomi daerah adalah kewenangan dalam pengelolaan asset daerah.

Aset daerah ialah potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah dan merupakan sumberdaya yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Aset tetap merupakan bagian utama dan berperan penting dalam aset pemerintah daerah karena mempunyai nilai yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya.

Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Bila aset dikelola dengan baik bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang, dilaksanakan berdasar asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik daerah meliputi; a. perencanaan kebutuhan; b. pengadaan; c. penggunaan; d. pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. penilaian; g. penghapusan; h. pemindahtanganan; i. penatausahaan; dan j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Dalam pelaksanaan pengelolaan barang tentu tidaklah mudah, terdapat masalah-masalah yang timbul terutama masalah ketidak jelasan keberadaan aset. Sering dijumpai dalam laporan keuangan bahwa nilai aset tetap yang disajikan belum didukung dengan pencatatan secara memadai, saldo aset tetap tidak sama antara pencatatan dan penyajian, aset tetap tidak ada keberadaannya, aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan, masalah-masalah seperti ini akan menghambat proses pengelolaan barang milik daerah.

Dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan pengelolaan aset yang baik untuk menghasilkan informasi yang akurat. Pengelolaan aset tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku. Atas dasar hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan barang milik daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016.

2. Metode

A. Pengertian Aset Tetap

Pada PSAP 07 paragraf 4 tahun 2010 “aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.” Berdasarkan PSAP 07, Aset tetap biasanya diklasifikasikan berdasar kesamaan sifat dan fungsinya. Berikut ini merupakan klasifikasi aset tetap :

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap lain
6. Kontruksi dalam Pengerjaan

B. Pengertian Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menuliskan bahwa, “barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lain yang sah.”

C. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pengelolaan barang dilakukan dengan azas pengelolaan barang milik daerah, yaitu azas fungsional, azas kepastian hukum, azas transparansi, azas efisiensi, azas akuntabilitas, dan azas kepastian nilai.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Studi Pustaka
4. Dokumentasi

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses secara umum dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data
2. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Allan, Ventje, dan Dhullo pada tahun 2014 di Kantor Pemerintahan Kota Manado menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, hanya saja petugas pengelola barang milik daerah belum sepenuhnya menguasai dan memahami proses pengelolaan barang sehingga kurang efisien dalam penyampaian laporan.
2. Penelitian oleh Adrian dan Muchlis tahun 2017 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menjelaskan bahwa, pada pemerintah daerah kabupaten Jeneponto pelaksanaan pengelolaan aset telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Namun dalam proses pengelolaannya ditemukan kendala yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran tiap individu tentang arti dan kegunaan aset ditambah dengan adanya perubahan struktur organisasi menyebabkan proses pengelolaan aset sedikit terhambat.
3. Penelitian oleh Conda, Yolinita, Linjte, dan Jessy di Kabupaten Minahasa Utara juga menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada Kantor Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai dengan 13 (tiga belas) siklus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
4. Penelitian lain oleh Yudistira di Kota Bandung tahun 2017, menjelaskan bahwa pengelolaan aset di Kota Bandung masih belum sesuai antara pelaksanaan di lapangan dengan yang tertulis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini terjadi karena kurangnya kesesuaian antara Peraturan Walikota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tatacara penyewaan barang milik daerah
5. Penelitian oleh Fitria Ayu dkk tahun 2017 di Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dengan regulasi yang berlaku, namun masih terdapat kurangnya rasa patuh tiap individu yang menyebabkan kendala selama proses pelaksanaan pengelolaan barang.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Sehingga proses berjalan pengelolaan barang milik daerah telah sesuai dengan regulasi yang ada.

1. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu

dengan keadaan yang telah berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Hal ini diperkuat dengan hal yang dikatakan oleh Bapak Suryo selaku Kepala pelaksana pengelolaan barang, yaitu sebagai berikut:

“Perencanaan merupakan proses administrasi yang dilakukan berdasar atas kondisi barang yang terdahulu di akhir tahun anggaran ditambah kondisi barang saat ini, yang akhirnya nanti disesuaikan dengan alokasi dana anggaran.”

BPKAD Provinsi Jawa Timur sebagai pengelola barang memastikan bahwa SKPD yang mengajukan perencanaan kebutuhan memang benar-benar membutuhkan barang tersebut.

2. Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan pemenuhan barang dan jasa. Pengadaan ini bisa dilakukan dengan cara membeli, membuat sendiri, atau menyewa. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan atau terbuka, bersaing, dan akuntabel. BPKAD selaku pengelola barang melakukan pemeriksaan pengadaan aset, memeriksa kualitas dan memeriksa apakah proses administrasi pengadaan aset ini sudah lengkap, termasuk juga melakukan inventarisasi dan pencatatan aset dan melaporkannya pada Kepala Daerah.

Kepala pelaksana pengelolaan barang mengatakan :

“Pengadaan dilakukan setelah ada surat perintah yang sudah ditandatangani Bapak Sekda (Sekertaris Daerah) dan/atau pejabat pengadaan. Yang kemudian harus kami laporkan proses pengadaan barang ini kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan penggunaan.”

3. Penggunaan

Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Gubernur menentukan status penggunaan barang milik daerah dan menyampaikan pada pengelola barang yang kemudian akan disampaikan pada pengguna barang yang mengusulkan penggunaan.

Hal ini juga dibenarkan oleh ketua pelaksana pengelolaan barang yaitu,

“Selaku pengelola barang BPKAD melakukan pengecekan pada data-data yang dilaporkan SKPD tertentu untuk usulan penggunaan barang, apakah dokumen sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan. Bila telah sesuai ya kita ajukan ke Gubernur untuk persetujuan status penggunaan.”

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk menyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa bentuk pemanfaatan antara lain sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan/atau bangun serah guna, dan kerjasama penyedia infrastruktur. Semua bentuk pemanfaatan ini diawali dengan pengajuan pengguna barang kepada pengelola barang, dan keputusan ditetapkan oleh Gubernur.

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan merupakan tindakan pengendalian atau penertiban yang dilakukan dalam upaya pengurusan barang milik daerah. Pengamanan wajib dilakukan oleh pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang. Ketua pelaksana pengelola barang mengatakan,

“Pengamanan dan pemeliharaan ini menjadi kewajiban pengguna barang, baik diamankan dalam bentuk fisik dan dokumentasi. Selain pengguna barang, pengamanan juga dilakukan oleh pengelola barang sebagai wujud perlindungan ganda bila hal yang tidak diinginkan terjadi.”

Pada Permendagri 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pengguna barang dan pengelola barang wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, baik pengamanan fisik maupun administrasi. Pengamanan fisik dilakukan dengan pemasangan batas pagar, pemberian label, dan juga dilakukan penjagaan secara rutin. Sedangkan pengamanan administrasi dilakukan dengan memastikan bahwa barang milik daerah telah tersimpan disistem dan dilengkapi dengan surat kepemilikan. Hal ini telah dilakukan oleh BPKAD selaku pengelola barang.

6. Penilaian

Penilaian barang dilakukan untuk penyusunan neraca pemerintah daerah. Penetapan nilai barang milik daerah untuk penyusunan neraca berpedoman pada peraturan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ketua pelaksana pengelolaan barang mengatakan,

“Dalam hal penilaian terkait pemanfaatan aset ini harus dilakukan penilaian oleh KJPP atau DJKN, penilaian diluar konteks pemanfaatan barang bisa dilakukan oleh penilai publik atau penilai yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Harus dilakukan penilaian aset karena dalam hal ini jangan sampai terjadi kerugian untuk negara.”

7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Provinsi.

8. Pemusnahan

Pemusnahan adalah sebagai tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah tersebut sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Teknis pelaksanaan pemusnahan pada kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan cara :

- 1) Dibakar;
- 2) Dihancurkan;
- 3) Ditimbun dalam tanah;
- 4) Ditenggelamkan dalam laut;
- 5) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Penghapusan

Penghapusan adalah sebagai tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola dan/atau Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna

dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Kasubag Bidang Aset juga mengatakan bahwa, pada dasarnya pemindahtangan, pemusnahan, dan penghapusan adalah hal yang sama, karena proses pelaksanaannya pun sama, harus diawali dengan pengajuan dari SKPD terkait pelaksanaan penghapusan barang, lalu usulan akan diperiksa oleh BPKAD untuk dilakukan pengecekan langsung terhadap barang yang diusulkan untuk dihapus. Lalu BPKAD akan berkoordinasi dengan pihak SKPD untuk memutuskan apakah barang tersebut akan dihapus dengan dimusnahkan atau dipindahtangankan.

10. Penatausahaan

Penatausahaan ini ialah rangkaian kegiatan yang meliputi tindakan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila pelaksanaan penatausahaan ini tidak dilakukan sesuai prosedur mengakibatkan terjadinya ketidaksamaan antara laporan aset daerah dengan laporan keuangan yang ada. Bapak Suryo selaku ketua pelaksana pengelolaan barang menyampaikan bahwa,

“Penatausahaan barang milik daerah dilakukan oleh pejabat penatausahaan, dalam hal ini yaitu pak Sekda dibantu BPKAD. Bila di SKPD, punggua barang wajib juga untuk melakukan menatausahaan barang”

11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban dan/atau oleh pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi. BPKAD Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan diadakannya rapat koordinasi dan sosialisasi antara BPKAD dan mengundang semua SKPD. Selain melakukan koordinasi biasanya juga diakan kegiatan terjun langsung ke lokasi untuk melihat sejauh mana pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ini sudah dilaksanakan.

Hal ini dikonfirmasi oleh ketua pelaksana pengelola barang sebagai berikut:

“Seperti yang tertulis diregulasi bahwa tanggungjawab terhadap pembinaan, pengendalian, dan pengawasan itu memang dilakukan oleh pengelola yaitu BPKAD. untuk prosesnya yaitu adanya rapat-rapat koordinasi dengan cara mengundang semua SKPD, yang kedua bisa dengan memberikan surat edaran untuk pelaksanaan dilapangan, selain itu juga dilakuka terjun ke lokasi untuk melihat bagaimana kasus yang terjadi dilapangan. terjun ke lapangan ini dilakukan karena seringkali yang namanya pengurus barang didaerah itu tidak begitu menguasai tentang bagaimana tanggungjawab pembinaan, pengendalian, sehingga perlu dilakukan pengawasan dari BPKAD.”

B. Dokumen yang Digunakan

1. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
2. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah
4. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5. Daftar Barang Pengguna / Daftar Barang Kuasa Pengguna
6. Kartu Inventaris Barang

7. Daftar Barang Milik Daerah
8. Buku Inventaris Dan Buku Induk Inventaris
9. Laporan Barang Semesteran Dan Tahunan
10. Laporan Barang Milik Daerah
11. Surat Perjanjian Pinjam Pakai
12. Bukti Kepemilikan Atas Nama Pemerintah Daerah
13. Daftar Hasil Pemeliharaan Barang
14. SK Penghapusan
15. SK Pemindahtanganan
16. SK Status Penggunaan Barang Milik Daerah

C. Kendala yang Terjadi

Dalam melakukan proses pengelolaan barang milik daerah tidak selalu berjalan lancar, tentu terdapat kendala yang dapat menghambat. Kendala yang sering terjadi pada pengelolaan barang BPKAD Provinsi Jawa Timur ialah adanya perbedaan jumlah antara laporan administrasi keuangan dan laporan pengelola barang.

Dikonfirmasi kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang, beliau mengatakan,

“Namanya mengelola barang milik daerah, triliun rupiah yang setiap tahun harus ada pengadaan barang, harus ada penghapusan barang pastilah ada yang namanya kendala atau hambatan. Biasanya ini terjadi di akhir tahun anggaran, yaitu terjadi selisih antara laporan administrasi keuangan dengan laporan pengelolaan barang.”

Hal ini terjadi karena adanya kesalahan pada saat proses pencatatan entah pada pejabat pengelola barang atau pada pejabat pengelola keuangan. Misalkan, terdapat barang yg sudah dikirim ke SKPD lain namun proses pada administrasi keuangannya belum selesai. Ada juga proses administrasi sudah siap dan selesai namun barang tak kunjung dikirim hanya tagihan saja yang dikirim.

4. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan pada bidang aset kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini dapat dilihat dari jalannya pengelolaan yang secara keseluruhan dilakukan secara runtut dan berpedoman pada peraturan yang ada, walau dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan misalnya keterlambatan dalam penyampaian laporan pengguna barang pada pengelola barang, kurangnya kelengkapan dokumen yang diajukan sebagai persyaratan pengguna barang kepada pengelola barang.
2. Kendala yang sering dialami BPKAD dalam melaksanakan pengelolaan barang ditemukan diakhir tahun anggaran, yaitu terjadi ketidaksamaan antara laporan pengelola barang dan laporan pejabat keuangan. Hal ini terjadi karena adanya komunikasi yang kurang antar SDM dalam pelaksanaan pengelolaan barang.

B. Saran

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah masih terdapat kendala pada kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur, maka penulis menyarankan :

1. Diadakan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan para pengguna dan pengelola barang agar meminimalisir adanya kekeliruan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
2. Perlunya peraturan yang jelas dalam menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan barang karena proses ini sangat berpengaruh pada hasil opini BPK.
3. Pengelola barang melakukan pengecekan secara rutin kepada tiap-tiap SKPD selaku pengguna barang agar dapat segera memberikan solusi jika terdapat masalah, sehingga masalah tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

Daftar Pustaka

- Andrian, Ikbar dan Muchlis, Mustakim. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016*. Makassar.
- Lestari, Fitria Ayu; Kalangi, Lintje dan Lambey, Linda. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Mongondow*. Sumatera Utara.
- Conda Liesye Yolinita Dita; Kalangi, Lintje dan Kalonga, Jessy DL. 2017. *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Minahasa Utara*. Minahasa Utara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 71 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Wonggow, Alan dan Ilat, Ventje dan Affandi Dhullo. 2014. *Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintahan Kota Manado Menurut Permendagri No.17 Tahun 2007*. Kota Manado.
- Yudistira, Yuyus. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Milik Daerah di Kota Bandung Berdasar Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016*. Bandung.
- Yusuf, M. 2010. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.